

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bila pendidikan diibaratkan bangunan bertingkat, maka Sekolah Dasar (SD) merupakan fondasi, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) merupakan lantai dasar, Sekolah Menengah Umum (SMU) merupakan lantai satu dan seterusnya. Atas dasar itu pula, maka masalah pendidikan selalu dipandang penting dalam penyelenggaraan pembangunan pada bangsa manapun, termasuk bangsa Indonesia didalamnya (UUSPN, 1989). Pendidikan bukan hanya dipandang penting sebagai sasaran pembangunan (dalam rangka peningkatan kualitas dan martabat manusia), melainkan juga sekaligus sebagai sarana pembangunan (dalam rangka penyiapan SDM) nasional.

Pembangunan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan bidang kesejahteraan rakyat ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Masyarakat yang cerdas akan memiliki kemampuan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, yang pada akhirnya akan mencapai kehidupan yang sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk menuju ke arah ini, pembangunan pendidikan harus dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan.

Pada hakikatnya hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan asasi bagi setiap manusia dan dilindungi oleh semua bentuk hukum, baik hukum agama, hukum internasional, maupun hukum nasional. Secara yuridis, tujuan

nasional pembangunan bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk "...mencerdaskan kehidupan bangsa...". Komitmen ini dituangkan dalam BAB XIII pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 bahwasanya :

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Lebih lanjut, dalam pasal 4 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 Tahun 1989 disebutkan bahwa :

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakaan dan kebangsaan.

Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenis dan jenjang pendidikan serta perluasan kesempatan belajar terutama pada jenjang pendidikan dasar. Hal ini sangatlah beralasan, karena "...orang yang pendidikan dasarnya tidak bermutu tentu tingkat keterdidikannya juga terhambat, hal seperti ini akan menyebabkan kendala bagi kemajuan masyarakat yang pada gilirannya tidak akan pernah mampu menjawab tantangan global" (Supriyoko, *Pikiran Rakyat*, 2001). Lagi pula, "keuntungan ekonomi pendidikan dasar cenderung lebih tinggi dari pada pendidikan menengah dan tinggi" (Djojonegoro, 1995:14). Hal ini terlihat dari tujuan diselenggarakannya pendidikan dasar itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) UUSPN yaitu:

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang

diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

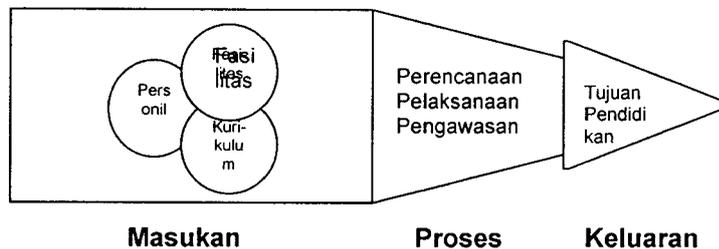
Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) UUSPN di atas, diperlukan daya dukung berbagai fasilitas baik material maupun non material yang akan menentukan terselenggaranya pendidikan dasar tersebut. Pihak mana yang bertanggungjawab untuk mengadakan daya dukung ini, dicantumkan dalam pasal 33 UUSPN bahwa "Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik." Sumber daya yang dimaksudkan disini, dijelaskan dalam pasal 1 ayat (10) UUSPN yaitu:

...pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik, dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Beberapa aspek yuridis tersebut di atas jelas diatur kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pihak terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Meskipun pemerintah merupakan pihak yang paling berkewajiban (UUD 1945 dan UUSPN), akan tetapi pada intinya komponen orang tua dan masyarakat pun memiliki kewajiban dan hak yang sama. Tidak ada komponen yang satu lebih berkewajiban dibandingkan dengan yang lain sebab ketiga sistem ini tidak dapat dipisahkan dan tertentun dalam satu supra sistem, bahkan "hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya dalam meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan" (Fattah, 2000:77).

Ketersediaan dana yang memadai akan sangat menentukan suksesnya kegiatan pendidikan. Sebagai input, fungsi dana untuk membiayai segala

kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Sehingga akan sangat menentukan suksesnya proses pendidikan yang pada gilirannya akan berdampak pada bermutunya output pendidikan. Hal ini digambarkan Engkoswara (1987:89) pada gambar berikut ini.



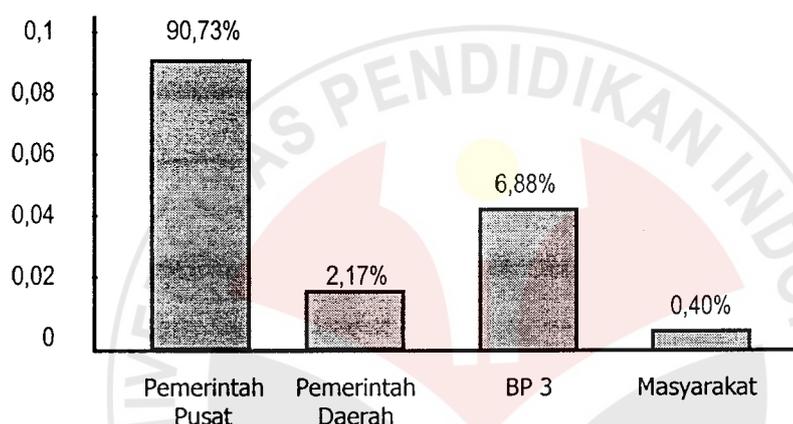
Gambar 1.1 Hubungan Antar Subsistem-Subsistem Organisasi Sekolah.

Dana dalam suatu kegiatan merupakan salah satu fasilitas yang berfungsi juga sebagai alat untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Biaya yang dimaksudkan disini adalah "sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan" (Fattah, 2000:112). Meskipun dana bukanlah satu-satunya faktor penentu, namun tanpa hadirnya dana yang cukup tidak akan berarti fungsi-fungsi administrasi lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebab unsur-unsur biaya pendidikan yang harus ditangani melalui pembiayaan pendidikan adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan baik secara langsung maupun tidak (sarana dan pra sarana pendidikan). Sehingga semakin besar dana yang tersedia kemungkinan akan semakin maksimal hasil yang akan dicapai. Sebaliknya, bila kekurangan dana, kemungkinan besar hasil yang akan dicapai pun sangat terbatas, malah tidak jarang banyak yang gagal.

Kewajiban pemerintah terhadap dunia pendidikan diwujudkan dalam berbagai bentuk yang terus menerus dilakukan dan ditingkatkan. Dalam rangka

pembiayaan pendidikan, pemerintah telah menyediakan anggaran pembiayaan pendidikan yang kiranya sama dengan anggaran bidang-bidang yang lain, malah pemerintah masih merupakan sumber yang paling dominan dalam membiayai pendidikan dibandingkan dengan orang tua dan masyarakat. Hal ini tersingkap dari hasil penelitian yang dilakukan Fattah (2000: 132) sebagaimana pada bagan berikut.

Bagan 1.1
Perbandingan Penerimaan Biaya Pendidikan Menurut Berbagai Sumber Dana



Pembiayaan pendidikan terdiri atas dua jenis anggaran yaitu: (1) anggaran rutin dan (2) anggaran pembangunan dengan dana yang berasal dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembiayaan sektor pendidikan pada semua jenjang dikelola oleh pemerintah sebagai tindak lanjut tanggungjawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana diamanatkan Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945. Akan tetapi karena berbagai problematika yang menyelimuti dunia pendidikan, ditambah lagi dengan krisis yang berkepanjangan, membuat sektor pendidikan belum tergarap dengan baik. Sehingga menyebabkan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun belum sampai pada tingkat yang diharapkan yaitu 20% dari total

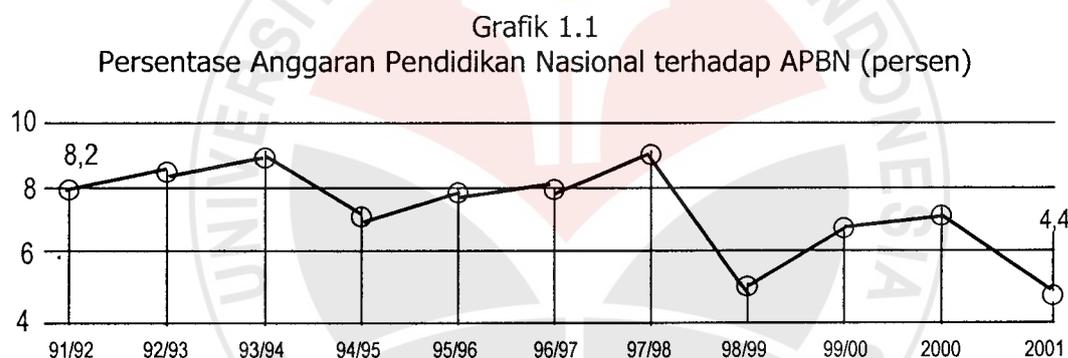
APBN. Sedangkan di negara-negara tetangga malah sudah melebihi dari ambang yang kita harapkan. Perbandingan anggaran pendidikan dengan negara-negara tetangga lainnya adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Untuk Pendidikan *High Performing Asian Economies* (HPAE) 1985

Negara	Persentase Dana untuk Pendidikan dari GNP	Persentase Dana untuk Dikdas dari GNP	% Budget	
			Dikti	Dikdas
Hongkong	2,8	1,9	25,1	69,3
Indonesia	2,3	2,0	9,0	89,0
Korea Selatan	3,0	2,5	10,3	83,9
Malaysia	7,9	5,9	14,6	74,9
Singapura	5,0	3,2	30,7	64,6
Thailand	3,2	2,6	12,0	81,3

Sumber: World Bank, *The East Asian Miracle* (Tilaar, 1995: 410).

Perbandingan alokasi anggaran pendidikan dari total APBN di negara kita adalah sebagaimana pada grafik berikut.



Sumber: Undang-undang Nomor 2/1991, No. 6/1992, No. 3/1993, No. 1/1994, No. 2/1995, No. 2/1996, No. 6/1997, No. 7/1998, No. 7/1999, No. 2/2000 (*Kompas*, 1 Mei 2001).

Sedangkan untuk tahun anggaran 2002, sektor pendidikan mendapat anggaran sebesar 24,7% dari total anggaran pembangunan, bukan dari total APBN. Hal ini masih sangat jauh dari harapan idealnya anggaran untuk sektor pendidikan.

Keterbatasan dana dan berbagai problematika lainnya yang menyelimuti dunia pendidikan di Indonesia sampai dengan hari ini bukanlah pertanda kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Dalam usulan anggaran dalam RAPBN 2002 bagi sektor pendidikan cukup menggembirakan bahkan

menempati prioritas tertinggi. Hal ini mencerminkan tekad pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Menurut Malik Fajar (Mendiknas) bahwasanya :

Kenaikan anggaran dalam APBN 2002 akan diprioritaskan untuk mencapai pemerataan pendidikan, sekaligus mencapai harapan agar dalam tempo dua tahun ke depan tata letak prinsip pendidikan, yakni mutu untuk sebanyak-banyaknya (peserta didik) dalam konteks diversifikasi. Maka idealnya, sebagai jawabannya, pendidikan harus bermutu, dan mutu itu harus pula diperuntukkan pula sebanyak-banyaknya bagi *education for all* dan *education of mess*. Itu juga bermakna *quality for all* (*Kompas*, 8 September 2001).

Disamping itu, untuk tahun anggaran 2002 pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar Rp. 1,2 trilyun untuk memberikan beasiswa kepada siswa SD sampai siswa SLTA di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, dikarenakan pola pikir yang salah dimana pemerintah pusat masih dijadikan satu-satunya pihak dalam pembiayaan pendidikan telah membawa dunia pendidikan ke lembah keterpurukan saat krisis ekonomi melanda negeri ini. Hal ini pula merupakan salah satu tuntutan dan harapan masyarakat yang tak henti-hentinya dan tak akan pernah berhenti adalah agar mutu pendidikan diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terlibat. Diperhatikan tentulah dimaksudkan ditingkatkan kepada yang lebih baik. Namun, dalam semantik yang lain, terkandung pula makna bahwa terdapat kekecewaan dan ketidakpuasan atas hasil pendidikan yang sekarang, walaupun standar mutu dan tingkat kepuasan itu sangat relatif. Dalam kaitannya dengan makna terakhir ini, berbagai pihak mendapat "claim", dan claim utama biasanya ditujukan kepada pihak pengelola pendidikan (management), disamping kepada orang tua, masyarakat umum, peserta didik sendiri, dan malah juga kepada sejarah.



Apabila direnungkan dengan hati yang lapang serta pikiran yang tenang, semua claims yang dapat berbentuk tuntutan, keinginan, cacian, kritikan atau saran itu adalah hal-hal yang sangat wajar mengingat perubahan-perubahan telah terjadi sangat cepat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat ilmu dan ketrampilan yang telah dimiliki terasa dan kelihatannya selalu tertinggal. Karena itu masyarakat menuntut penyesuaian melalui claim yang ditujukan pada sistem manajemen pendidikan yang belum baik, tidak efektif, tidak efisien, tidak profesional dan manajemen yang tidak efektif dan tidak efisien menyebabkan masalah pendidikan secara akumulatif menjadi bertambah runyam.

Banyak catatan hitam yang dilansir berbagai media tentang kegagalan dunia pendidikan. Mantan Mendiknas Yahya Muhaimin (*Media Indonesia*, 28 April 2001) mengemukakan bahwa :

APM (SLTP) baru sekitar 60% dan angka putus sekolah sangat mengkhawatirkan. Sekitar 10% angka buta huruf berasal dari penduduk Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas. Dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat SD yang dilaksanakan oleh organisasi *International Educational Achievement* (IEA) menunjukkan bahwa siswa SD Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat SLTP, studi untuk kemampuan matematika siswa Indonesia pada urutan ke-34 dari 38 negara. Untuk kemampuan IPA pada urutan ke 32 dari 38 negara peserta.

Laporan terakhir dari Depdiknas disebutkan bahwa saat ini 800.000-900.000 siswa SD putus sekolah akibat berbagai sebab. Ini sangat menyedihkan, mengingat sejak 11 tahun yang lalu sudah diterapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Apalagi Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sudah tidak ada, meski sekolah masih memungut uang Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).

· Terdapat lebih dari 3 juta anak usia SLTP tidak bersekolah. Sementara itu, Itjen Depdiknas mengungkapkan bahwa anak usia 13-15 tahun yang tidak tertampung di tingkat SLTP mencapai 1.046.230 orang. Saat ini terdapat 16 juta penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf dan 5 juta orang di tingkat usia produktif (antara 10-44 tahun). Salah satu penyumbang angka buta huruf adalah anak-anak SD yang putus sekolah. Anak-anak SD yang putus sekolah di kelas satu sampai kelas tiga akan cenderung menjadi buta huruf lagi (*Kompas*, 18 April 2001). Sedangkan persentase angka putus sekolah pelajar SLTP di Indonesia pada enam tahun terakhir menempati urutan teratas dibandingkan dengan angka putus sekolah pada pelajar SD dan SLTA. Namun, dilihat dari besaran jumlah anak yang putus sekolah tampak bahwa sebagian besar anak yang putus sekolah itu berada di tingkat SD.

Data pada pusat statistik pendidikan Balitbang Depdiknas menunjukkan, jika pada tahun ajaran 1995/1996-1997 hanya tercatat 226.007 anak (3,25%) yang putus sekolah, tahun lalu pada periode 1998/1999-1999/2000 naik menjadi 313.282 siswa (4,14%). Khusus untuk tingkat SD dan SLTA (SMU/SMK) justru mengalami penurunan, baik angka maupun persentasenya. Jika pada periode 1995/1996-1996/1997 tercatat 303.108 anak (3,09%) SD yang putus sekolah, pada pergantian tahun ajaran lalu 1998/1999-1999/2000 jumlah anak putus sekolah hanya 778.457 anak atau 3,03%. Adapun untuk SLTA turun dari 208.7886 anak (4,94%) yang putus sekolah pada periode 1995/1996-1996/1997 menjadi 159.902 orang atau tinggal 3,42 persen.

Kenaikan angka putus sekolah yang sangat mencolok justru terjadi pada periode 1996/1997-1997/1998 atau khusus ketika negeri ini mulai dilanda krisis

ekonomi. Angka putus sekolah pada tingkat SD yang sebelumnya 803.108 anak naik menjadi 932.150 anak untuk kemudian turun kembali hingga dua tahun ajaran berikutnya menjadi 778.457 anak SLTP yang sebelumnya tercatat 226.007 anak yang putus sekolah, pada awal masa krisis itu naik menjadi 389.346 lalu dalam dua tahun ajaran berikutnya turun secara perlahan hingga "tinggal" 313.282 anak. Adapun SLTA yang sebelum masa krisis tercatat 208.786 anak putus sekolah ketika krisis terjadi naik menjadi 289.700 anak putus sekolah sebelum akhirnya kembali turun menjadi hanya 159.902 anak putus sekolah. Sedangkan untuk tingkat propinsi, perkembangan angka putus sekolah SLTP menunjukkan pada periode 1998-2000 provinsi Aceh (Kini; Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi NAD sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh) menduduki urutan angka putus sekolah tertinggi, yakni 10,75%. Disusul Lampung (7,46%), Kalimantan Tengah (6,48%), Maluku (6,31%), Kalimantan Selatan (6,26%), Irian jaya (6,16%), DKI Jakarta (5,99%), Jambi (5,72%), Sulawesi Utara (5,62%), dan Jawa Barat (2,12%). Untuk tingkat SD pada periode sama, angka putus sekolah di Sulawesi Utara mencapai persentase tertinggi, yakni 8,33% disusul Aceh (6,33%), dan Nusa Tenggara Timur (5,72%). Sedangkan pada tingkat SLTA, untuk SMU, Provinsi Aceh masih berada di urutan teratas sebesar 8,76%. Adapun untuk SMK, Maluku, Lampung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Sulawesi tengah memiliki angka putus sekolah cukup besar di atas tujuh persen sampai 12,07 persen (*Kompas*, 20 April 2001).

Hal ini mengakibatkan menurunnya peringkat *Human Development Index* (HDI) atau kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia pada posisi 109 pada tahun 2000 dari urutan 105 pada tahun 1999, hal ini berdasarkan catatan *Human Development Report* tahun 2000 versi United Nation Development Program (UNDP). Peringkat itu jauh di bawah Philipina (77), Thailand (76), Malaysia (61), Brunai Darussalam (32), Korea Selatan (30), Singapura (30), dan juga negara-negara lain yang relatif baru dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan nasionalnya. Penilaian itu diperkuat lagi oleh laporan dari *International Institute of Management Development* pada tahun 2000 yang menyebutkan, dari 48 negara yang diukur, daya saing SDM Indonesia menempati urutan ke-47, sementara Thailand (34), Philipina (32), Malaysia (29), dan Singapura (2).

Meskipun demikian, sangatlah mengagumkan hal yang terjadi pada sebahagian masyarakat meski dengan segala keterbatasan masih tetap mempertahankan anaknya di bangku sekolah. Sebagaimana kasus yang terungkap dari hasil penelitian Supriadi, (2000:77) bahwa :

Pada sebagian besar masyarakat ada anggapan luas bahwa putus sekolah di tingkat SD merupakan aib keluarganya. Karena itu, apa pun resikonya dan berapapun harganya, orang tua berusaha untuk memper-tahankan anaknya di sekolah. Untuk membayar iuran BP3 dan memenuhi kebutuhan sekolah lainnya, orang tua berusaha keras mencari uang sekalipun pembayarannya terlambat atau mesti meminjam uang kepada orang lain.

Dari kasus di atas, jelas tergambar betapa semangat para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka meskipun berbagai problema yang mereka hadapi. Sehingga, tidaklah adil bilamana semua kesalahan ini ditujukan kepada pemerintah. Karena pada prinsipnya "pemerintah sebenarnya serius menangani masalah peningkatan mutu manusia Indonesia, tetapi keterbatasan

dana mengakibatkan pemerintah tak bisa berbuat banyak” (Yahya A. Muhaimin, *Kompas*, 21 Maret 2001).

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kondisi yang ada antara lain; diperluasnya jangkauan SLTP Terbuka, Paket A dan Paket B, SLTP Kecil, program double shift, serta merencanakan dengan sistem jarak jauh. Disamping itu, Depdiknas juga menggunakan segala cara dan teknik memaksimalkan anggaran yang relatif kecil demi mencegah jangan sampai anak kehilangan peluang pendidikan, yakni paspornya untuk kehidupan yang lebih baik pada masa depan. Program beasiswa SIAP senilai total Rp. 10 milyar ini rencananya akan berjalan untuk tujuh tahun dengan target total mencapai 4.000 penerima (*Pikiran Rakyat*, 14 Maret 2002).

Menurut Romly (2000:2) banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan antara lain :

Pertama, sumber daya manusia (guru) yang belum memenuhi kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas. *Kedua*, kurikulum yang belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan..., *Ketiga*, fasilitas (sarana dan prasarana yang belum memadai, dan *Keempat*, dana pengelolaan pendidikan yang belum mencukupi kebutuhan, disamping itu masih terdapat faktor-faktor lain diantaranya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat masih rendah.

Pendapat di atas mengisyaratkan bahwa pemerintah bukanlah merupakan satu-satunya sumber pembiayaan, akan tetapi masih banyak sumber-sumber pembiayaan pendidikan lainnya yang kini belum tergarap dengan baik. Salah satunya adalah perlu partisipasi yang tinggi dari pihak masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Dari partisipasi ini diharapkan mampu menutupi kekurangan dari dana yang bersumber dari pemerintah. Kewajiban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan telah ditetapkan dalam Instruksi Bersama Mendikbud (Mendiknas) dan Mendagri Nomor 29 tahun 1974. Lagi pula,

hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Sehingga "...pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas" (Fattah, 2000:v).

Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak, sebab menurut Wardiman (*Kompas*, 1 Mei 2001) pembangunan sektor pendidikan di era SDM memiliki kecenderungan sebagai berikut :

Pertama, pendidikan akan semakin dituntut untuk tampil sebagai kunci dalam pengembangan SDM. Yaitu manusia yang memiliki kemampuan, kepribadian, dan ketrampilan sesuai dengan tuntutan pembangunan. *Kedua*, dunia kerja semakin kuat berorientasi kepada kemampuan nyata (*what one can do*) yang dapat ditampilkan oleh lulusan pendidikan. *Ketiga*, sebagai akibat era SDM, maka akan semakin banyak diperlukan tenaga ahli di bidang pengembangan SDM pada tingkat profesional yang mampu mendiagnosis di bidang pendidikan dan pengembangan SDM untuk kemudian menawarkan pemecahannya.

Lebih lanjut, Muhaimin (*Kompas*, 21 Maret 2001) mengatakan bahwa:

Peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah karena sumber dana dan daya yang dimiliki sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan keterlibatan pihak swasta baik dari yayasan penyelenggara pendidikan maupun dunia usaha-dalam upaya tersebut akan lebih besar lagi.

Sedangkan Rofii (*Media Indonesia*, 14 Maret 2001) menegaskan lagi bahwa:

Masyarakat harus menyadari bahwa perbaikan kualitas pendidikan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada pemerintah. Mulai saat ini harus bisa melibatkan publik. Itulah sebabnya untuk masa mendatang peningkatan kualitas pendidikan sebaiknya menyertakan peran orang tua melalui BP 3.

Lembaga pendidikan sebagai salah satu lembaga sosial dalam masyarakat, keberadaannya sangat dekat malah tidak dapat dipisahkan dari komunitas masyarakat dimana lembaga pendidikan itu berada. Sistem sosial-budaya, politik, ekonomi dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat akan

ikut mewarnai lembaga pendidikan. *Educational is life* sehingga keberadaan sekolah adalah didorong oleh kebutuhan masyarakat, karena itu "...tanggungjawab pendidikan di sekolah merupakan tanggung-jawab masyarakat, keluarga, dan pemerintah" (Rukmana dan Mulyati, 2001:51).

Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa keberadaan lembaga pendidikan mengharuskan keikutsertaan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai faktor pendukungnya, sehingga dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat.

Untuk memberdayakan partisipasi ini, perlu adanya suatu jalinan komunikasi antara masyarakat dan segala komponennya dengan lembaga pendidikan. Menurut Ratnawulan dan Sutarsih (2001:151) bahwa "banyak hikmah yang dapat diterima dari hubungan sekolah dengan masyarakat, di antaranya :

- a. penentuan sumber dan kebutuhan belajar
Kualitas murid dalam arti bahwa sekolah yang bersangkutan tidak akan kekurangan murid yang meminatinya sehingga dapat memperoleh murid yang baik dan mampu mempertahankannya untuk tetap mengikuti pendidikan di sekolah tersebut;
- b. tersedianya tempat-tempat penelitian
Untuk mengimbangi teori yang di peroleh di sekolah diperlukan praktek lapangan. Untuk mendapatkan praktek ini banyak dijumpai kesulitan-kesulitan bila ternyata sekolah tersebut kurang mendapat tempat di hati masyarakatnya. Oleh sebab itu, hubungan yang baik dengan masyarakat sangat diperlukan;
- c. pemenuhan sarana dan prasarana
Banyak diantara sekolah-sekolah yang terbentur pada masalah sarana dan prasarana dalam usaha melayani pendidikan untuk masyarakatnya. Melalui hubungan baik dengan masyarakat memungkinkan dapat membantu dalam pemecahan masalah tersebut; dan
- d. pemenuhan sumber dana dan daya manusia yang terungkap dalam cipta, rasa, karsa, dan karyanya.

Surakhmad (*Kompas*, 17 Maret 2002) berpendapat bahwa "...untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional maka tidak bisa tidak pengelolaan pendidikan harus dikembalikan pada masyarakat." Dengan demikian, tidak ada lagi kebijakan di bidang pendidikan yang hanya mencerminkan kemauan menteri atau pemerintah. Pemerintah memang harus membuat visi pendidikan nasional, tetapi biarkan masyarakat mengatur sendiri operasionalisasi pendidikannya. Karena upaya peningkatan mutu pendidikan adalah kerja besar sehingga harus diikuti komitmen yang kuat dengan mengembalikan pendidikan pada masyarakat. Implikasinya, yang diutamakan dalam sistem pendidikan nasional bukan lagi pandangan Menteri atau pemerintah, tetapi pandangan dan apa yang menjadi kehendak masyarakat itu sendiri. Harus ada upaya penyadaran bahwa pendidikan itu punya masyarakat sendiri.

Komunitas masyarakat terdiri dari berbagai komponen yang ada didalamnya, baik itu orang per orang maupun organisasi/lembaga dengan segala bentuknya. Partisipasi orang per orang telah dibuktikan melalui pembiayaan yang dilakukan bagi pendidikan anaknya yang sedang di bangku sekolah, baik dalam bentuk BP3 maupun biaya-biaya lainnya sebagaimana peraturan yang berlaku. Organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan sangat sedikit, disamping itu kemampuan dana mereka pun sangat terbatas. Seperti halnya yang dilakukan Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (YLGN-OTA), hingga tahun 1999-2000 ini jumlah anak asuh yang sudah dibantu YLGN-OTA sebanyak 235.067 anak terdiri dari 192.782 anak SD/setara dan 42.285 anak SLTP/setara (*Republika*, 23 Oktober 2000). Sedangkan jumlah anak asuh di

pusat data YLGN-OTA mencapai 971.078, sedangkan anak asuh di seluruh Indonesia adalah 7,2 juta orang (*Republika*, 20 November 2000).

Disamping itu, komponen lain yang sangat diharapkan bantuannya adalah dunia usaha sebagai organisasi nirlaba (profit). Secara internal, menjadi kewajiban dunia usaha membantu membiayai pendidikan anak-anak para karyawannya, disamping juga fasilitas-fasilitas lainnya. Akan tetapi secara eksternal, bantuan dunia usaha terhadap pembiayaan pendidikan, khususnya lembaga-lembaga pendidikan yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Untuk saat ini, bentuk partisipasi mereka sebagai tambahan dan bersifat sukarela serta belum kontinyu. bahkan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Hal ini telah dan sedang ditempuh oleh PT. ExxonMobil Oil Indonesia Inc. (EMOI) dan PT. Arun NGL Co. (PTA) terhadap sekolah-sekolah yang ada di lingkungan operasionalnya. Bantuannya bukan hanya untuk wilayah kabupaten, propinsi, tapi juga mencakup seluruh wilayah Indonesia. Apa yang ditempuh dunia usaha tersebut sangatlah beralasan, karena secara awam bantuan-bantuan tersebut sangatlah sedikit dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan yang mereka raih setiap tahunnya. Bahkan sejak ditemukannya migas sebesar 17,1 Triliun *Standard Cubic Feet* (SCF) oleh Pertamina dan EMOI yang mendorong mereka untuk membentuk PTA di tahun 1973 yang merupakan perusahaan patungan dalam eksploitasi gas alam. Setelah hadirnya dua perusahaan raksasa tersebut, pada tahapan berikutnya hadir pula beberapa perusahaan lain seperti PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Persero, PT. Asean Aceh Fertilizer (AAF) Persero, dan PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero yang semuanya dalam wilayah kabupaten Aceh Utara.

Dari tahun ke tahun keuntungan yang mereka raih terus meninggi, berdasarkan catatan tahun 1980, PTA sudah menghasilkan devisa US\$ 1,17 miliar dengan ekspor LPG sebanyak 2,94 juta ton dan kondensat (jenis LNG yang belum diolah dan masih mengandung oksigen) 16,7 juta ton. Tahun 2000, nilai ekspor dari lapangan gas EMOI mencapai US\$ 1,14 miliar atau Rp. 12 triliun. Berarti sekitar 40% dari nilai ekspor LNG Indonesia yang berjumlah Rp. 30 triliun. (*Media Indonesia*, 18 Maret 2001).

Tabel 1.2
Produksi Gas Alam EMOI Tahun 1995 -1999

Tahun	Produksi (MMBTU)	
	Per Tahun	Rata-Rata Per Hari
1995	1.180.552.300	3.234.400
1996	1.171.611.555	3.201.124
1997	1.132.456.392	3.102.867
1998	921.856.322	2.525.658
1999	794.299.489	2.176.163

Sumber : DC/ICN (*Kompas*, 17 April 2001).

Keterangan : 1 MMBTU (Million British Thermal Unit) = 0,0194 M Ton = 0,04472 m³.

Tabel 1.3
Produksi Kilang PTA Menurut Jenisnya Tahun 1995 -1999

Tahun	LPG (M Ton)	LNG (MMBTU)
1995	1.253.142	597.227.725
1996	1.142.626	587.634.994
1997	664.746	596.312.170
1998	445.521	561.226.736
1999	221.249	590.821.637

Sumber : DC/ICN diolah (*Kompas*, 17 April 2001).

Keterangan : LPG (Liquified Petroleum Gas), LNG (Liquified Natural Gas).

Sebagaimana di negara-negara lain, perusahaan-perusahaan industri di Arab Saudi diminta untuk membayar program-program membaca dan menulis untuk pekerja, menyediakan buku, dan bahan belajar. Di Brazilia diatur dalam undang-undang bagi perusahaan industri yang mempekerjakan lebih dari seratus orang karyawan diharuskan membantu pendidikan dasar membiayai anak-anaknya. Demikian pula "...perusahaan-perusahaan dagang mensponsori

program-program diklat dalam peningkatan kemampuan tenaga kerja” (Fattah, dan Abubakar, 2001:135). Begitu juga halnya, kehadiran PT. Arun NGL Co. dan PT. ExxonMobil Oil Indonesia Inc. telah banyak memberikan andil bagi pengembangan masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Hal ini dapat terlihat dari partisipasinya dalam melakukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek, yaitu: kepemimpinan dan struktur administrasi desa, pendidikan/ketrampilan dan generasi muda, keagamaan, kesehatan dan gizi, sosial budaya, mata pencaharian penduduk, dan sarana dan prasarana melalui dana *Community Development* (CD) di kecamatan-kecamatan yang berlokasi paling dekat dengan perusahaan dan kecamatan-kecamatan lainnya bahkan menyeluruh tingkat provinsi dan nasional. Khususnya untuk dunia pendidikan, pembinaan yang dilakukan perusahaan industri mencakup membantu pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana sekolah di lingkungan sekitarnya, seperti menyediakan tanah untuk lokasi sekolah/PT, mendirikan sekolah di lingkungan perusahaan, membantu pembangunan gedung, pengadaan alat, pemberian beasiswa, pemberian kesempatan melaksanakan kerja praktek di lingkungan perusahaan, dan lain-lain (Aziz, 1996:179). Sedangkan pada perusahaan EMOI dari hasil survey lapangan ditemukan bahwa pihak perusahaan telah ikut ambil bagian dalam pembinaan pendidikan di kecamatan-kecamatan di sekitar lokasi perusahaan. Setiap tahun bantuan diberikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Di samping itu, EMOI setiap tahunnya selalu menurunkan tim medisnya untuk melakukan imunisasi ke sekolah-sekolah mulai dari SD sampai SMU. Dalam bentuk sarana fisik, bantuan yang telah berikan kepada sebagian besar sekolah dalam bentuk pembangunan unit gedung baru (UGB), renovasi, pembangunan lapangan olah raga, alat-alat laboratorium,

buku-buku paket, meja dan kursi, pakaian seragam, dan juga beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu.

Melihat besarnya andil perusahaan dalam pembinaan pendidikan di dua kecamatan tersebut, ternyata belum diikuti dengan peningkatan mutu lulusan pada sekolah sasaran. Hal ini ditemukan dari penelitian yang dilakukan Afif (2000) bahwa masih banyak daerah tingkat II yang Nilai Ebtanas Murni (NEM) berada dibawah rata-rata nasional yaitu 6,19, meskipun untuk tingkat propinsi sangat menggembirakan yaitu 6,31, berada di atas rata-rata NEM nasional. Rata-rata NEM Lulusan SD/MI Di Aceh Tahun 1999 setiap Kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4
Rata-rata NEM Lulusan SD/MI Di Aceh Tahun 1999

Tingkat	Kabupaten/Kota										Aceh
	Sabang	Banda Aceh	Aceh Besar	Aceh Pidie	Aceh Utara	Aceh Timur	Aceh Tengah	Aceh Barat	Aceh Selatan	Aceh Tenggara	
SD	6.80	8.32	7.00	6.19	4.78	5.65	6.88	6.24	5.80	5.44	6.31
MI	6.26	7.95	6.80	6.16	5.56	5.44	6.53	4.59	5.90	6.00	6.11

Sumber: Afif, (2000:96) (Diolah).

Data pada tabel di atas terlihat bahwa Aceh Utara menempati rata-rata paling rendah untuk SD dari seluruh daerah tingkat II dalam provinsi Aceh dan berada pada posisi ketiga untuk MI dengan perolehan rata-rata SD (4.78) dan rata-rata MI sebesar 5.56. Sedangkan jumlah siswa mengulang untuk provinsi Aceh sebanyak 41.850 orang atau 6,01% masih di atas rata-rata nasional yaitu 4,65%, putus sekolah sebanyak 4.575 siswa atau 0,66% masih di bawah rata-rata nasional, dan siswa yang lulus sebanyak 78.865 orang dari 82.246 siswa kelas enam atau 95,89% masih dibawah rata-rata nasional 101,76%.

Tabel 1.5
Siswa Mengulang, Putus Sekolah, dan Lulus (1999)

No	Nama Kab./Kota	Siswa To-1	Mengulang (To)		Putus Sekolah		Siswa Kelas 6 To-1	Lulusan	
			Jlh	%	Jlh	%		Jlh	%
1	Sabang	3.398	0	0,00	161	4,74	659	659	100,00
2	Banda Aceh	27.091	473	1,75	0	0,00	4.200	4.200	100,00
3	Aceh Besar	42.895	2.937	6,85	152	0,35	5.300	5.411	102,09
4	Pidie	77.009	1.859	2,41	152	0,33	10.182	9.984	98,06
5	Aceh Utara	169.476	13.915	8,21	202	0,12	20.601	19.055	92,50
6	Aceh Timur	123.589	8.016	6,49	84	0,07	14.656	14.217	97,00
7	Aceh Tengah	39.024	1.223	3,13	151	0,39	5.375	5.375	99,96
8	Aceh Barat	97.639	5.751	5,89	1.869	0,91	7.732	7.660	99,07
9	Aceh Selatan	76.877	6.661	8,66	189	0,25	8.463	7.347	86,81
10	Aceh Tenggara	39.029	1.015	2,60	1.515	3,88	5.078	4.959	97,66
	D.I. Aceh	696.027	41.850	6,01	4.575	0,66	82.246	78.865	95,89

Sumber : Kanwil Diknas Aceh Tahun 1999 (Afif, 2000:97).

Angka mengulangnya, meskipun bukan yang paling tinggi namun kabupaten Aceh Utara menempati urutan kedua (8,21%) setelah kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan ketersediaan fasilitas pendukung belajar pada tingkat SD hanya 1,14% dimiliki Aceh Utara, jelasnya sebagaimana hasil penelitian Alfian (Kanwil Diknas Aceh, 1999) pada tabel berikut.

Tabel 1.6
Persentase Ketersediaan Fasilitas Pendukung Belajar (1999)

No	Nama Kab./Kota	SD				MI				
		SRI	PUSE	LO.R	UKS	SRI	PUSE	LO.R	UKS	
1	Sabang	36	88.89	0.00	0.00	4	25.00	0.00	0.00	27.50
2	Banda Aceh	120	60.00	45.83	17.50	11	54.55	18.18	0.00	39.69
3	Aceh Besar	217	16.13	23.50	16.13	51	25.49	13.73	25.4	19.15
4	Aceh Pidie	383	0.00	0.00	0.00	78	25.64	0.00	28.2	3.04
5	Aceh Utara	662	0.30	0.00	1.21	100	12.00	3.00	1.00	1.14
6	Aceh Timur	476	1.05	0.00	0.21	69	0.00	0.00	0.00	0.37
7	Aceh Tengah	248	20.16	5.24	0.00	42	0.00	0.00	0.00	7.24
8	Aceh Barat	447	84.79	101.2	5.59	69	91.30	88.41	0.00	63.31
9	Aceh Selatan	391	4.60	0.00	0.00	33	0.00	0.00	0.00	1.42
10	Aceh Tenggara	227	34.36	70.93	80.62	26	100.0	53.85	46.1	62.45
	D.I. Aceh	3.207	20.92	22.83	8.51	483	29.19	18.01	9.94	17.63

Sumber: Alfian (Kanwil Diknas, 1999)(Diolah).

Dari berbagai indikator mutu yang disebutkan di atas, ternyata Aceh Utara belum sampai pada tingkat yang diharapkan. Padahal terdapat banyak sumber-sumber pembiayaan yang merupakan partisipasi dunia usaha terhadap lembaga pendidikan di kabupaten ini, akan tetapi hal ini belum dapat diimbangi



dengan peningkatan mutu pendidikan dibandingkan kabupaten lain yang tidak ada pembiayaan dari pihak swasta.

Atas dasar ini semua, penulis melihat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pola yang selama ini telah ditempuh dunia usaha dalam partisipasinya untuk membiayai dunia pendidikan serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan dan ketersediaan fasilitas pada lembaga pendidikan, khususnya pada tingkat pendidikan dasar yaitu SD dan SLTP. Demi tercapainya harapan akan tujuan dari pemerataan dan perluasan pendidikan dasar. Karena "ketidakikutan seseorang dalam pendidikan disebabkan oleh seperangkat sikap-sikap sosial" (Soedomo, Brookfield, 1987:7).

B. Fokus Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berfokus pada "Manajemen Partisipasi Dunia Usaha Dalam Pembiayaan Pendidikan Dasar" kaitannya dengan keefektifan manajemen partisipasi dunia usaha terhadap mutu proses dan output pendidikan.

C. Pertanyaan Penelitian

Secara lebih rinci, fokus masalah di atas dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana manajemen partisipasi dunia usaha dalam pembiayaan pendidikan?
2. Bagaimana pengelolaan yang dilakukan sekolah terhadap partisipasi dunia usaha dalam pembiayaan pendidikan?

3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap partisipasi dunia usaha dalam pembiayaan pendidikan?
4. Bagaimana dampak dari partisipasi dunia usaha terhadap peningkatan mutu proses dan output pendidikan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran empirik mengenai peranan dunia usaha dalam membiayai pendidikan. Khususnya penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen partisipasi dunia usaha dalam pembiayaan pendidikan?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang dilakukan sekolah terhadap partisipasi dunia usaha dalam pembiayaan pendidikan?
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban sekolah terhadap partisipasi dunia usaha dalam pembiayaan pendidikan?
4. Mendapatkan gambaran dampak dari partisipasi dunia usaha terhadap peningkatan mutu proses dan output pendidikan?

E. Premis Penelitian

1. Ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya berbagai kegiatan pendidikan. Bersama-sama dengan unsur-unsur administrasi pendidikan yang lainnya, seperti manusia/personil, fasilitas, dan teknologi pendidikan. Dana berfungsi untuk kemudian menghasilkan keluaran tertentu yang menunjang keberhasilan tujuan penyelenggaraan

pendidikan. Apabila dana yang diperlukan telah cukup tersedia, maka dituntut adanya pengelolaan yang cermat terhadap sumber-sumber dana. Artinya selain memikirkan berapa jumlah dana yang mencukupi kebutuhan pendidikan, perlu pula dipikirkan darimana dana itu diperoleh (Fattah. dan Abubakar, 2001:131).

2. Pendidikan dasar merupakan salah jenjang pendidikan paling menguntungkan bagi investasi pembangunan suatu negara. Berbagai penelitian menunjukkan, pendidikan dasar memberikan *rate of return* paling tinggi dibandingkan jenjang lainnya (*Kompas*, 1 Mei 2001).
3. Krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan meningkatnya ancaman terhadap terjadinya putus sekolah, namun sebagian besar siswa tidak sampai putus sekolah karena pendidikan SD telah menjadi kebutuhan siswa, orang tua, dan masyarakatnya. Hal ini terbukti dari hasil studi yang dilakukan Supriadi terungkap bahwa pada sebagian besar masyarakat ada anggapan luas bahwa putus sekolah di tingkat SD merupakan *aib* bagi keluarganya. Karena itu, apapun resiko dan berapapun harganya, orang tua berusaha untuk mempertahankan anaknya di sekolah (Supriadi, 2000:77).
4. Sejak dahulu, masalah pemenuhan kebutuhan dana pendidikan itu dipandang sebagai hal yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini telah diamanatkan oleh UUD 1945, bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membiayai pendidikan sesuai dengan fungsinya. Namun karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan maka tanggungjawab atas

pembiayaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua (Fattah, dan Abubakar, 2001:131).

5. Termasuk ke dalam golongan masyarakat juga adalah sumbangan-sumbangan swasta, perorangan atau keluarga, perusahaan, badan-badan sukarela dan kelompok-kelompok.
6. Banyak hikmah yang dapat diterima dari hubungan sekolah dengan masyarakat, di antaranya: (1) penentuan sumber dan kebutuhan belajar, (2) tersedianya tempat-tempat penelitian, (3) pemenuhan sarana dan prasarana, (4) pemenuhan sumber dana dan daya manusia yang terungkap dalam cipta, rasa, karsa, dan karyanya.
7. Untuk tercapainya hasil yang optimal bantuan-bantuan dari masyarakat tersebut perlu dikelola dengan benar dan koordinasi departemen terkait.

F. Paradigma Penelitian

“Paradigma diartikan sebagai suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai, suatu pandangan tentang dunia sekitar. Paradigma mengarahkan penelitian” (Nasution, 1988:2). Berknaan dengan penelitian ini, paradigma (kerangka berpikir) nya adalah sebagai berikut :



Gambar 1.2 Paradigma Penelitian

Dari gambar di atas jelas terlihat bahwasanya penyelenggaraan pendidikan adalah tanggungjawab pemerintah, sebagaimana diamanatkan pembukaan dan pasal 31 UUD 1945. Selanjutnya pihak kedua yang bertanggungjawab adalah keluarga/orang tua siswa. Hal ini ditetapkan dalam Instruksi Bersama Mendikbud (kini Mendiknas) dan Mendagri Nomor: 29 Tahun 1974, dimana BP3 bertugas mengusahakan bantuan masyarakat dalam bentuk uang, benda, maupun jasa. Adapun bantuan masyarakat dalam bentuk uang adalah: (1) Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP); (2) BP3; (3) Donasi para dermawan; (4) Pinjaman tanpa bunga dari orang tua murid; (5) Usaha koperasi; dan (6) Hasil kerajinan siswa.

Keikitsertaan masyarakat dan berbagai komponen yang ada didalamnya diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan dasar dan Menengah. Berkaitan dengan sumber dan jenis-jenis pembiayaan pada Sekolah Dasar (SD) disebutkan bahwa: (1) pemerintah daerah wajib menyediakan dana pendidikan bagi SD negeri dan memberikan subsidi kepada SD Swasta, (2) Dana masyarakat/orang tua siswa, (3) Sumber lainnya seperti hibah/sumbangan dan lain-lain, dan (4) Yayasan/ penyelenggara SD Swasta menyediakan anggaran rutin operasional SD Swasta.

Dana yang berasal dari sumber-sumber tersebut di atas untuk membiayai komponen-komponen sebagai berikut :

1. gaji dan kesejahteraan guru dan pegawai sekolah;
2. kegiatan teknis edukatif untuk proses belajar mengajar (kurikuler dan kegiatan evaluasi belajar);

3. kegiatan penunjang untuk operasionalisasi KBM dan kegiatan ekstra kurikuler;
4. perawatan peralatan teknis edukatif (alat peraga serta media);
5. perawatan kegiatan penunjang (gedung, perabot, lingkungan sekolah);
6. perjalanan (Kepala Sekolah dan guru);
7. kegiatan kemasyarakatan;
8. konsumtif (barang habis pakai);
9. langganan daya dan jasa; misalnya listrik, telepon, dan PAM;
10. porseni dan kegiatan lomba; dan
11. program khusus kegiatan peningkatan mutu sekolah.

Sedangkan sumber-sumber dan jenis pembiayaan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa sumber pembiayaan (1) Pemerintah Daerah, yang menyediakan anggaran bagi SLTP negeri dan swasta, (2) Dana masyarakat termasuk dana dari orang tua, masyarakat, dan dunia usaha diupayakan untuk membiayai peningkatan mutu program pengayaan dan program khusus yang disepakati orang tua, (3) Sumber lain, misalnya hibah, pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun komponen-komponen yang yang perlu dibiayai antara lain: (1) kegiatan teknis edukatif untuk proses belajar mengajar (kurikuler dan kegiatan evaluasi hasil belajar); (2) kegiatan penunjang untuk operasionalisasi ruang belajar dan kegiatan ekstra kurikuler; (3) perawatan sarana pendidikan (gedung, perabot, alat peraga, dan media); (4) perawatan kegiatan penunjang (lingkungan sekolah); (5) kesejahteraan guru dan pegawai sekolah (gaji kelebihan jam mengajar, insentif, perjalanan); (6) langganan daya dan jasa; (7)

porseni dan kegiatan lomba; dan (8) program khusus yang mengacu pada peningkatan mutu sekolah yang bersangkutan.

Dalam Keputusan Mendiknas tersebut mengisyaratkan bahwa Pemerintah Pusat bukan lagi satu-satunya sumber pembiayaan pendidikan, sebab pemerintah daerah juga harus turut serta dalam membiayai pendidikan. Berpedoman pada keputusan ini, berarti sumber-sumber pembiayaan pendidikan bukan hanya dari tiga sumber (pemerintah pusat, orang tua, dan masyarakat) akan tetapi juga pemerintah daerah.

Disamping itu, gambar tersebut di atas mengandung makna bahwa lembaga pendidikan (sekolah) merupakan sistem dari supra sistem. Dalam prosesnya, pendidikan mencakup dan dipengaruhi oleh berbagai komponen yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut secara rinci disebutkan Makmun (2000:16), adalah :

a. komponen masukan (input)

Perangkat masukan mencakup segala hal yang berkontribusi dan/atau berpengaruh kepada sistem. Terdiri atas: masukan dasar (manusia: peserta didik, bukan manusia: data, fakta, informasi, permasalahan/tugas, cita-cita/komitmen, dsb). Masukan instrumental (SDM, infrastruktur, dana, sarana/prasarana, cara, media, dsb.), dan masukan lingkungan (trigatra: geografik, demografik dan kultural; pancagatra: politik, ekonomi, sosial, hankam, dan agama).

Rinciannya, komponen masukan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu :

- 1) masukan mentah (*raw input*) adalah peserta didik dengan berbagai karakteristik yang berhubungan dengan faktor internal (struktur kognitif, pengalaman, sikap, minat, ketrampilan, kebutuhan, belajar, aspirasi dan lainnya. Faktor eksternal adalah status sosial, pendidik, biaya dan sarana belajar, geografis, dan lainnya.
Warga belajar yang menjadi sasaran lembaga pendidikan adalah keseluruhan mereka yang memerlukan ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk memenuhi tuntutan hidup.
- 2) Masukan sarana (*Instrumental input*) merupakan keseluruhan sumber dan fasilitas yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang dapat melakukan kegiatan belajar.

- 3) Masukan lingkungan (*Environmental input*) yaitu hal-hal yang ada di lingkungan yang menunjang dan/atau mendorong jalannya program pendidikan.
- 4) Masukan lain (*other input*) merupakan daya lain yang memungkinkan peserta didik dan output dapat menggunakan kemampuan yang telah dimilikinya untuk kemajuan kehidupan.

b. Proses

Mencakup seluruh rangkaian kegiatan transformatif dan/atau interaktif dalam pemanfaatan segala masukan untuk mewujudkan tujuan sistem/unit kerja. Terdiri atas perangkat kegiatan pokok yang terprogram/terjadwal dalam siklus/jangka waktu tertentu yang relatif panjang (formal) atau dalam jangka waktu relatif pendek/singkat (non-formal); serta kegiatan-kegiatan penunjang yang bersifat non-formal dan informal.

Dalam komponen ini terdiri dari interaksi antara masukan sarana (khususnya pendidik) dengan masukan mentah (warga belajar). Proses merupakan kegiatan-kegiatan :

- 1) belajar-membelajarkan, para pendidik membantu warga belajar agar aktif melakukan kegiatan belajar.
- 2) Bimbingan dan penyuluhan.
- 3) Evaluasi.

c. Keluaran (output)

Berhasil tidaknya suatu proses terhadap "pematangan" masukan mentah, dapat dilihat pada tingkat kemampuan ataupun ketrampilan yang dicapai oleh lulusan. Perubahan ini mencakup pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan aspirasi.

Perangkat keluaran; mencakup segala hal yang datang dan sebagai produk atau hasil atau akibat dari proses kegiatan transformasional atau interaktif yang terjadi dalam (internal) sistem/unit kerja. Keluaran itu disebut hasil (outputs), jika langsung dan segera dapat diamati dan diukur (immediate, shortterm result); dan disebut dampak (outcomes), jika baru kemudian nanti dalam jangka waktu lama dapat terdeteksi (longterm result). Hasil-hasil tersebut dapat berwujud manusia (lulusan dan/atau putusan) dengan perangkat perubahan peengetahuan, sikap, aspirasi dan ketrampilannya dan/atau perubahan perilaku dan pribadinya secara utuh. Selain itu hasil-hasil dapat berupa jasa (pelayanan tertentu) dan/atau karya (iptek, humaniora, produk barang/material dan pemecahan masalah.

Sedangkan kriteria untuk mengetahui bermutu atau tidaknya output lembaga pendidikan dapat dilihat dari indikator-indikator mutu, yaitu: (1) mutu masukan, (2) mutu proses, (3) mutu SDM, (4) mutu fasilitas, dan (5) biaya.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif sudah merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya dan diartikan juga sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Miller, 1986; dan Maleong, 1997).

Bentuk penelitian kualitatif yang digunakan disini adalah bercirikan *deskriptif analitik*, yaitu "untuk memperoleh gambaran tentang status gejala pada saat penelitian (*expose de facto*) atau untuk melihat kondisi apa yang ada dalam situasi" (Winarno, 1982; dan Best, 1989). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah; (1) angket, (2) wawancara, (3) studi dokumentasi, dan (4) observasi.

H. Lokasi dan Sampel Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini mengambil lokasi empat kecamatan yaitu; (1) kecamatan Tanah Luas, (2) kecamatan Matangkuli, (3) kecamatan Syamtalira Aron, dan (4) kecamatan Muara Dua. Kecamatan-kecamatan tersebut berada dalam kabupaten Aceh Utara provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penetapan kecamatan-kecamatan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa dalam keempat kecamatan tersebut merupakan tempat dimana *main project* dan *main office* dari kedua dunia usaha berada.

2. Sampel Penelitian

Beberapa pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Dunia Usaha

Dunia usaha yang dijadikan sampel adalah perusahaan Amerika Serikat yang merupakan *sharing product* dengan PERTAMINA yaitu; EMOI dan PTA. Meskipun dalam wilayah kabupaten Aceh Utara masih terdapat beberapa perusahaan lain, seperti PT. Asean Aceh Fertilizer (AAF) Persero, PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Persero, dan PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) Persero. Pemilihan dua perusahaan yang disebutkan pertama dikarenakan disamping sebagai perusahaan raksasa migas, juga yang mensuplai bahan bakar untuk ketiga perusahaan yang disebutkan belakangan. Atau dengan kata lain, keberadaan ketiga perusahaan ini dikarenakan adanya kedua perusahaan migas.

b) Relation's Manager/Relation's Officer/Community Development Supervisor/ Kepala Biro Humas atau lainnya.

c) Sekolah

Sekolah yang dijadikan sampel adalah sekolah-sekolah yang ada dalam kelima kecamatan tersebut yang terdiri dari SD dan SLTP. Dimana masing-masing kecamatan diambil 1 (satu) sekolah baik SD maupun SLTP dipilih berdasarkan kriteria yang berlokasi paling dekat dengan dunia usaha terkait.

d) Kepala sekolah/wakil Kepala Sekolah, sebagai pimpinan tertinggi pada level lembaga sekolah dan diasumsikan bahwa segala sesuatu hanya kepala sekolah yang paling tahu dan juga para wakilnya.

